

ANALISA KENDALA PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT* DI KOTA SURABAYA

Liziad Aditya Soetanto¹, dan Kenny Jonathan Setiobudi²

ABSTRAK : *E-Procurement* atau Pengadaan secara elektronik adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melaksanakan *E-Procurement* sejak tahun 2002 hingga saat ini.. Banyaknya pihak yang terlibat dan jumlah serta nilai pekerjaan dalam pelaksanaan *E-Procurement* di Kementerian PU memberikan kendala dan tantangan tersendiri dari segi sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi yang digunakan, hingga proses pengawasan dalam pelaksanaannya secara langsung. Pada penelitian ini telah didapatkan aspek kendala secara umum selama pelaksanaan *E-procurement* hingga saat ini, aspek kendala utama yang memiliki peran besar dalam penentuan kesulitan pelaksanaan *E-procurement* selama ini dan aspek kendala yang bukan merupakan sebuah kesulitan selama pelaksanaan *E-procurement* hingga saat ini. Pada tulisan ini, penulis berharap untuk dapat berbagi pengalaman, solusi dan tantangan pengembangan *E-Procurement* kepada seluruh pengguna *E-Procurement*.

KATA KUNCI : E-procurement, kendala, Kesulitan

1. PENDAHULUAN

Electronic procurement (E-Procurement) merupakan satu hal yang amat penting dalam setiap implementasi *E-government* pada hampir seluruh pemerintahan. Di Indonesia pada umumnya pengadaan barang dan jasa sistem konvensional dilakukan dengan cara peserta lelang melakukan tatap muka dengan panitia lelang. Hal ini kurang efisien dari segi biaya, waktu serta berpotensi menimbulkan berbagai praktek penyimpangan. Tujuan *E-Procurement* adalah meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa, meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kendala pada tahap persiapan dan pada tahap proses pengadaan barang maupun jasa menggunakan *E-Procurement*, mengetahui aspek kendala yang paling berpengaruh pada tahap persiapan/pengadaan barang maupun jasa menggunakan *E-Procurement*, dan Mengetahui aspek kendala yang paling berpengaruh pada saat proses pengadaan barang maupun jasa menggunakan *E-Procurement* berlangsung.

¹ Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, liziad_a_s@yahoo.com

² Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, fatalis92@live.com

³ Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, pnugraha@peter.petra.ac.id

2. STUDI LITERATUR

E-procurement dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu *E-tendering* dan *E-purchasing*. *E-Tendering* adalah proses pengadaan barang/jasa yang diikuti oleh penyedia barang/jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran, sedangkan *E-Purchasing* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui katalog elektronik. *E-Tendering* sama persis dengan pola pengadaan yang selama ini dilaksanakan secara manual, perbedaannya hanya seluruh tahapan dilaksanakan secara elektronik, sedangkan *E-Purchasing* menggunakan cara yang sama sekali berbeda. Pengguna barang/jasa tinggal memilih barang/jasa yang diinginkan melalui katalog elektronik yang terbuka serta transparan. Katalog ini disusun oleh LKPP melalui sebuah kontrak payung kepada Produsen atau penyedia utama, sehingga harga yang ditawarkan dipastikan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Khusus *E-Purchasing*, saat ini masih belum dilaksanakan, menunggu payung hukum selesai ditandatangani oleh Presiden. Untuk kedepan pada tulisan ini, setiap istilah *E-procurement* berarti mengacu kepada *E-Tendering*.

2.1 Kendala E-Procurement

Berdasarkan studi literature pada penelitian ini, didapat beberapa kendala pada pelaksanaan *E-procurement*. Menurut kutipan dari Eadie et al (2007) didapat beberapa kendala *E-procurement* yaitu: keamanan transaksi, tidak ada keyakinan atas kelegalan hukum pada *E-procurement*, kurangnya hubungan bisnis dengan pemasok yang menyediakan *E-procurement*, infrastruktur teknis yang tidak memadai dan berkurangnya integrasi dengan rekanan, kurangnya pengetahuan *E-procurement* / personil terampil, keprihatinan interoperabilitas, kurangnya keahlian teknis, tidak ada manfaat bisnis secara nyata, budaya perusahaan, dukungan manajemen, sistem IT yang terlalu mahal, dan tidak memiliki infrastruktur IT. Menurut Sulaiman dan Chen (2006) pelaksanaan e-procurement di Indonesia masih ada beberapa kendala dan kendala tersebut terbagi menjadi 4 yaitu: dalam bidang hukum, infrastruktur, standarisasi prosedur, serta kontrol proses pengadaan *E-procurement*. Menurut Jasin (2007) menyebutkan bahwa beberapa kendala atau kelemahan dan permasalahan teknis dalam penerapan *E-procurement* yang dihadapi diantaranya: Penyedia barang/jasa (vendor) banyak yang belum memahami aplikasi *E-procurement*, Panitia Pengadaan sebagian besar masih mengalami kesulitan untuk menggunakan dan memahami aplikasi *E-procurement*, Tingkat kelalaian yang sangat tinggi dalam penggunaan password dan kunci kerahasiaan lainnya oleh user, baik Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pelaksanaan Kegiatan maupun Panitia Pengadaan, Range jadwal state lelang masih belum sepenuhnya bisa diikuti oleh Panitia Pengadaan tepat sesuai yang telah ditetapkan, Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya (seperti scanner, installer adobe, dll) masih sangat terbatas untuk Panitia Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Terbatasnya *bandwidth* menyebabkan masih seringnya terjadi kegagalan proses pada aplikasi *E-procurement*, Kekhawatiran beberapa kalangan di internal Pemerintah Kota Surabaya bahwa penghasilan tambahan mereka saat menjalankan aktifitas pengelolaan pengadaan (mulai dari pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan) akan terpotong habis. Menurut jurnal dari kementerian PU mengenai “Kendala, Keberhasilan dan Tantangan dalam Sembilan Tahun Pelaksanaan E-Procurement di Kementerian PU dalam Mencapai Good Governance” yaitu: Penerbitan regulasi dari internal Kementerian PU untuk mengatur dan mendukung pelaksanaan E-Procurement, Perubahan personel pengadaan akibat mutasi pegawai juga merupakan masalah yang dihadapi pada saat implementasi. Perpindahan pegawai sering tidak disertai dengan transfer knowledge dari personel lama ke personel baru. Resistensi berasal dari pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan E-Procurement. akses internet yang belum tersebar luas dan juga kecepatan akses internet masih terbatas. Menurut Wartaegov (2009) yang dikutip oleh Anik Pujiati (2010) mengenai beberapa masalah yang muncul dalam pengadaan barang / jasa secara elektronik

adalah: Keharusan memilih harga terendah sehingga peserta cenderung banting harga, Pengadaan barang/ jasa yang bersifat sulit diukur (intangible), Besarnya sorotan publik sehingga menimbulkan efek enggan bagi peserta lelang, belum ada standar baku setaraf payung hukum mengenai standar proses E-procurement, rendahnya komitmen pemimpin negara dalam melaksanakan E-procurement. Dari berbagai macam kendala tersebut, disusunlah indikator-indikator pertanyaan yang merupakan hasil dari sumber – sumber yang didapat. Pembagian dari Indikator pertanyaan ini akan dilakukan menjadi 3 bagian berdasarkan spesifikasi yang telah dijelaskan di atas dimana mengacu pada 3 aspek yaitu: aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan pengawasan prosedur. **Tabel 1** dibawah menunjukkan indikator-indikator kendala yang telah dikelompokan berdasarkan dari studi literatur.

Tabel 1. Indikator Kendala E-Procurement

I. TINGKAT KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA	
A.1	Tingkat pemahaman Pengguna Jasa/Panitia Lelang terhadap Perpres No. 54/2010
A.2	Tingkat pemahaman Penyedia Jasa terhadap Perpres No. 54/2010
A.3	Ketersediaan panitia lelang dalam melaksanakan <i>e-procurement</i>
A.4	Ketersediaan tenaga ahli dalam pengadaan <i>e-procurement</i>
A.5	Tingkat kemampuan personil dalam penguasaan IT
A.6	Tingkat kemampuan personil dalam menjalankan tahapan-tahapan <i>e-procurement</i>
II . KONDISI INFRASTRUKTUR DAN PENGATURAN SISTEM PENDUKUNG E-PROCUREMENT	
B.1	Peralatan teknologi informasi yang dimiliki instansi
B.2	Kapasitas Bandwith untuk kelancaran proses pengisian data
B.3	Alat pengganti tanda tangan, stempel dan materai
B.4	Perlindungan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi (virus atau hacker)
B.5	Ketersediaan petunjuk/pedoman pelaksanaan <i>e-procurement</i>
B.6	Biaya yang tersedia untuk pembangunan sistem <i>e-procurement</i> yang ideal
III. PENGAWASAN PROSEDUR	
C.1	Pengawasan yang transparan
C.2	Proses kualifikasi yang terpercaya
C.3	Penanganan masalah dalam pelaksanaan lelang menggunakan <i>e-procurement</i>
C.4	Kesiapan instansi dalam mengikuti <i>e-procurement</i>
C.5	Kesiapan panitia lelang dalam mengaplikasikan <i>e-procurement</i>
C.6	Sosialisasi sistem e-procurement kepada Penyedia dan Pengguna Jasa

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi literature terhadap *E-procurement* dimana dalam studi literature tersebut akan ditemukan berbagai macam kendala dari *E-procurement*. Kemudian dari berbagai macam kendala tersebut dibentuk menjadi kuesioner dan dibagikan kepada sejumlah kontraktor yang berada di kota Surabaya. Setelah itu hasil dari kuesioner tersebut dilakukan analisa sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai perumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah data- data tentang seberapa besar pengaruh suatu kendala dari pelaksanaan *E-procurement* pada masing-masing variabel. Data-data tersebut diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada kontraktor berdasarkan pengalaman mereka mengikuti *E-procurement*. Kuesioner tersebut berisikan tentang data pribadi responden, kuesioner pendahuluan tentang *E-procurement*, dan

kuesioner yang menunjukkan 18 Indikator kendala yang telah kami peroleh dari studi literatur secara ekstensif.

3.1 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan 2 macam alat ukur pengujian yaitu :

1. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan dan konsistensi kuisioner penelitian yang digunakan berdasarkan nilai-nilai yang dihasilkan pada setiap butir pertanyaan. Perlu diketahui

2. Mean

Analisa mean skor akan kami gunakan untuk menentukan Skor kesulitan dari masing-masing Variabel. Kemudian dari hasil mean tersebut akan ditemukan nilai-nilai kendala dalam pelaksanaan *E-procurement*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, nilai signifikansi dari indikator suatu kendala menggunakan 1 variabel, yaitu tingkat kesulitan dari 18 buah indikator yang terbagi menjadi 3 buah variabel. Tingkat kesulitan tersebut akan dibagi menjadi 4 buah indikator yaitu "SANGAT MUDAH", "MUDAH", "SULIT", dan "SANGAT SULIT". Tiap-tiap indikator memiliki nilai tersendiri dimana skor tersebut memiliki skala 1 sampai 4. Skor 1 dimulai dari indikator "SANGAT MUDAH" hingga skor 4 pada indikator "SANGAT SULIT". Skor tertinggi diberikan pada indikator "SANGAT SULIT" dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah menemukan kendala pada pelaksanaan *E-procurement* di kota surabaya sehingga indikator "SANGAT SULIT" diberi skor tertinggi dan indikator "SANGAT MUDAH" diberi skor terkecil. Kami menggunakan 3 variabel kontrol yang kami dapatkan dari hasil studi literatur kami. Dimana kendala dari penerapan E-Procurment tersebut terbagikan dalam 3 bagian, yaitu:

A adalah kendala di seputar sumber daya manusia

B adalah kendala di bagian teknis termasuk sarana, prasarana, dan infrastruktur,

C adalah kendala di bagian pengawasan penerapannya secara langsung dan manajemennya.

Analisis deskriptif memberikan gambaran nilai mean skor dan peringkat masing-masing variabel kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian secara kuantitative dimana sumber data penelitian diperoleh dari sejumlah sumber yang berbeda dimana sejumlah sumber tersebut memiliki tujuan yang sama dalam mendukung penelitian ini. Pada bagian pendahuluan kuesioner, responden diupayakan merupakan sumber yang memiliki kredibilitas dan pengalaman di bidang *E-Procurement*

4.1. Uji Reliabilitas

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	47	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	47	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

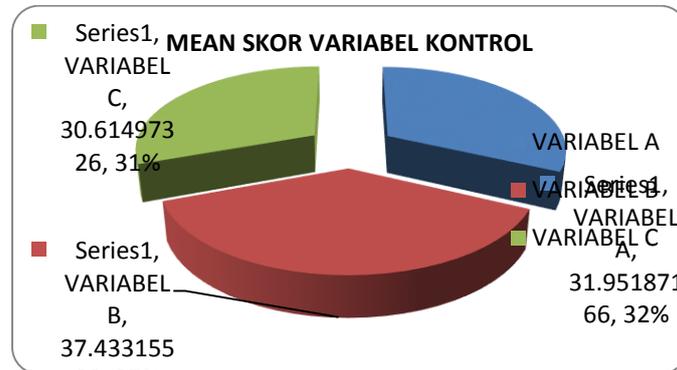
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,748	18

Gambar 1. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Menggunakan SPSS

Data yang diuji adalah hasil jawaban responden terhadap variabel penelitian yaitu faktor kendala yang terbagi menjadi 3 variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang

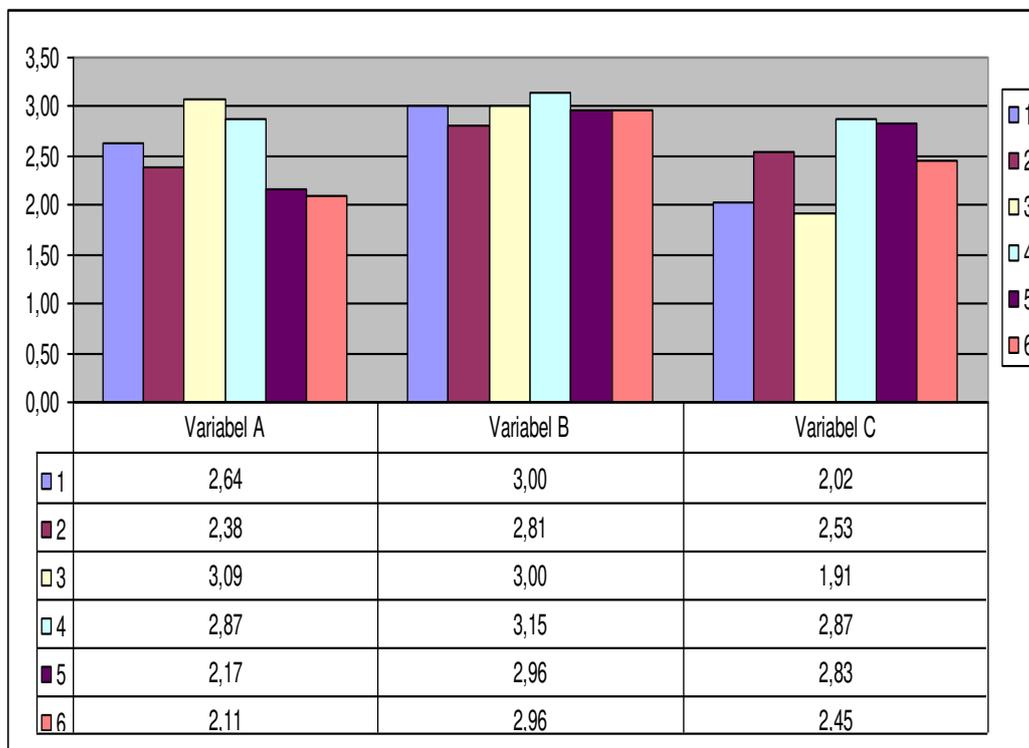
terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas menggunakan uji Cronbach Alpha (α), dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha sebesar 0.60 atau lebih.

4.2 Uji Mean



Gambar 2. Mean skor variabel kontrol

Dari **Gambar 2** di atas dapat disimpulkan bahwa variabel B memiliki pengaruh kendala yang besar dibanding 2 variabel yang lain dalam hal pelaksanaan *E-procurement* di kota Surabaya sedangkan variabel C merupakan variabel yang memiliki nilai rata-rata terendah sehingga dapat dikatakan bahwa variabel C bukanlah kendala yang berarti dalam hal pelaksanaan *E-procurement* di kota Surabaya.



Gambar 3. Mean skor masing-masing indikator pada tiap variabel

Dapat dilihat pada **Gambar 3** bahwa Indikator yang paling menentukan dalam penentuan tingkat kesulitan pelaksanaan *E-procurement* di kota Surabaya adalah indikator B4 dengan poin pertanyaan ” Perlindungan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi (virus atau hacker)”. Indikator B4 memiliki nilai mean yang tertinggi diantara yang lainnya yaitu 3,15 sehingga dapat dikatakan bahwa kendala

utama dari pelaksanaan *E-procurement* adalah mengenai permasalahan Perlindungan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi (virus atau hacker).

Sedangkan indikator yang paling tidak menentukan dalam penentuan tingkat kesulitan pelaksanaan *E-procurement* di kota Surabaya adalah indikator C3 dengan poin pertanyaan ” Penanganan masalah dalam pelaksanaan lelang menggunakan *E-procurement*”. Indikator C3 memiliki nilai mean terendah diantara yang lainnya yaitu 1,91 sehingga dapat dikatakan bahwa penanganan masalah dalam pelaksanaan lelang dengan menggunakan *E-procurement* bukanlah sebuah kendala yang berarti.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aspek kendala yang cukup berarti secara luas selama pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik / *E-procurement* terdapat pada aspek teknis dimana aspek teknis yang dimaksud mencakup sarana, prasarana dan infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan *E-procurement*.
2. Kendala utama yang terjadi selama proses pengadaan barang dan jasa melalui *E-procurement* adalah Perlindungan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi (virus atau hacker).
3. Selama proses pengadaan barang dan jasa melalui *E-procurement*, hal yang dirasa bukanlah sebuah kendala yang signifikan dan menyulitkan adalah penanganan masalah dalam pelaksanaan lelang dengan menggunakan *E-procurement*.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Eadie, R, Perera, S Heaney, G & Carlisle, J. (2007). “Drivers And Barriers To Public Sector E-procurement Within Northern Ireland’s Construction Industry”. *Journal of Information Technology in Construction* , Vol. 12, 103-107.
- Jasin, M. (2007). *Mencegah Korupsi Melalui E-procurement*. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Bogor, Jawa Barat.
- Pujiati, A. (2010). ”*Analisa Penerapan E-Procurement Pada Pemerintah Daerah Tingkat II (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bogor)*”
- Sulaiman, I. & Chen T. (2006). *Catatan Khusus bagi Implementasi Eprocurement di Indonesia*.
http://www.clgi.or.id/publikasi/index.php?act=ndetail =article&p_id=35,
<http://www.nepri.com>.